

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Hamzah dan Irdan Dahlan. (1984). *A. Hamzah dan Irdan Dahlan*. Ghalia Indonesia.
- Abdul Aziz hakim. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Achmad, E. S. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4).
- Afif Khalid. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al 'Adl, Volume VI*(Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan di Indonesia), 9–36.
- Al Wisnubroto dan G Widiartana. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Anthon Freddy Susanto. (2015). *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*. Setara Press.
- Bambang Poernomo. (1982). *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni.
- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2020). Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *Litigasi*, 20(20), 20–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- C.I. Harsono Hs. (1995). *Sistem BON Pembinaan Narapidana*. Djambatan.
- Dahlan, M. Y. A.-B. dahlan. (2003). *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Target Press.
- Djoko Prakoso. (1988). *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Liberty.
- Dwidja Pritanto. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, 2(1), 4.
- Gustav Radbruch. (1995). *Strafrecht*. Criminal Law.

- Handoyo, B. H. C. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 3(2), 4.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Jacob Elfinus Sahetapy. (1982). *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Rajawali Press.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Prenadamedia Group.
- M. Ali Zaidan. (2016). Kebijakan Kriminal. *Kebijakan Kriminal*, 45.
- M. Sholehuddin. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada.
- Martiman Prodjohamidjojo. (1984). *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramitha.
- Martiman Prodjohamidjojo. (1989). *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Pradnya Paramita.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2008). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. CV. Rajawali.
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih. (2000). *Ilmu Negara (edisi revisi)*. Gaya Media.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ni'matul Huda. (2012). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Oemar Seno Adji. (1989). *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga.
- Otje Salman dan Anton F Susanto. (2005). *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. PT. Refika Aditama.
- Pahlawan, H. M. R., & Chessa Ario Jani Purnomo. (2020). Problematika Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan Studi Socio-Legal. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 6.2, 107–117.

- Prof. Dr. Imam Suyitno, M. P. (2012). *Penelitian Dekripsi Kelas*.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Roeslan Saleh. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. (1996). *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Bina Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.
- Septiawan Santana K. (2010). *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Serlika Aprita dan Sarah Qosim. (2022). Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2).
- Soedjono Dirdjosiswoyo. (1984). *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remaja Karya.
- Soerjono Soekanto. (1980). *Intisari Hukum Keluarga Jakarta, Alumni, 1980, Hlm. 50* (Soekanto Soerjono (ed.)). *Intisari Hukum Keluarga Jakarta, Alumni, 1980, Hlm. 50*.
- Sri Mamudji, S.H., M. L. . (2010). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Penerbit Alumni.
- Syarif Saddam Rivanie. (2020). “Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.” “*Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*,” 4, 100.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Thomas Nagel. (2005). *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*.
- Urbanus Ura Weruin. (2017). “*Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Vivi Ariyanti. (2019). Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Yang Berkeadilan Gender Dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, Dan Eksekusi,”. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Yang Berkeadilan Gender Dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, Dan Eksekusi*, 3(2), 178.
- Wahdanigsi. (2015). Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. *Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar*.
- Waluyo, B. (n.d.). *PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENERAN KEADILAN RESTORATIF DAN TRANSFORMATIF*. SINAR GRAFIKA.
- Yesmil Anwar and Anwar. (2008). Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, 2, 16.
- Yopi Gunawan and Kristian. (2015). Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila. *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, 3, 92.
- Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika.

B. Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 -28 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 277 - 280

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Piana (KUHAPidana) Pasal 1 Angaka 8

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 -55

C. Sumber Lainnya

Pahlawan, H. M. R., & Chessa Ario Jani Purnomo. (2020). Problematika Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan Studi Socio-Legal. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 6.2, 107–117.

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.